

ULAMA MUHAMMADIYAH INVOLVEMENT IN
PHYSICAL REVOLUTION IN YOGYAKARTA
YEAR 1945-1949

By
Andrian Eka Yulianto
12407141030

ABSTRACT

The struggle maintain for Indonesian's independence occurred in various regions one of them in Yogyakarta. Muhammadiyah as an organization Islam Participate to defend Indonesia's Independence through the clerical struggle. Askar Perang Sabil is one of the struggle bodies set up by the Ulama Muhammadiyah. This news first spread through the Office Domei in Yogyakarta Yogyakarta and getting a response from Sri Sultan Hamengku Buwono IX and Sri Paduka Paku Alam VIII states joining the Republic of Indonesia. To accelerate the course of the government established the National Committee of Indonesia (KNI) and the Regional KNI. In Yogyakarta, several events occurred during the reign of Japan such as invading the New Town and the Great House. Besides the Muhammadiyah scholars took part in the formation of Askar Perang Sabil (APS) and Markas Ulama Askar Perang Sabil (MUAPS) in order to maintain the independence of Indonesia. Ulama Muhammadiyah also contribute to the Physical Revolution againts the Dutch. On Military Aggression I Ulama Muhammadiyah deploy an APS for the first time to the battle front to the region Mranggen and Srandol. On Military Aggression II Ulama Muhammadiyah along with APS and military forces work together in maintaining the independence of Indonesia in Yogyakarta. Many important events that occurred during this period, not only in the city of Yogyakarta, but also occurred in the area of the districts in Yogyakarta, such as in Bantul, Kulon Progo, Gunung Kidul, and Sleman. The highlight of Ulama Muhammadiyah participation in Physical Revolution that is helping the military on 1 March General Offensive with the task of inhibiting the Dutch troops enter the city.

Keywords: Muhammadiyah Ulama, Physical Revolution, Yogyakarta.

**KETERLIBATAN ULAMA MUHAMMADIYAH DALAM
REVOLUSI FISIK DI YOGYAKARTA
TAHUN 1945-1949**

**Oleh
Andrian Eka Yulianto
12407141030**

ABSTRAK

Perjuangan mempertahankan kemerdekaan bangsa Indonesia terjadi di berbagai daerah salah satunya di Yogyakarta. Muhammadiyah sebagai organisasi Islam turut serta dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia melalui perjuangan para ulamanya. Askar Perang Sabil merupakan salah satu badan perjuangan yang dibentuk oleh para ulama Muhammadiyah. Berita proklamasi tersiar pertama kali di Yogyakarta melalui Kantor Domei Yogyakarta dan mendapat respon dari Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paduka Paku Alam VIII yang menyatakan bergabung dengan Republik Indonesia. Untuk melancarkan jalannya pemerintah dibentuklah Komite Nasional Indonesia (KNI) dan KNI Daerah. Di Yogyakarta terjadi beberapa peristiwa pada zaman pemerintahan Jepang seperti peristiwa penyerbuan terhadap Gedung Agung dan Kota Baru. Ulama Muhammadiyah turut andil dalam pembentukan Askar Perang Sabil (APS) dan Markas Ulama Askar Perang Sabil (MUAPS) dalam rangka mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Ulama Muhammadiyah juga turut andil dalam Revolusi Fisik melawan Belanda. Pada Agresi Militer I Ulama Muhammadiyah menerjunkan pasukan APS untuk pertama kali ke front pertempuran yaitu daerah Mranggen dan Sronol. Pada Agresi Militer II Ulama Muhammadiyah beserta pasukan APS dan TNI saling bekerjasama dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia di Yogyakarta. Banyak peristiwa-peristiwa penting yang terjadi pada masa ini, tidak hanya di Kota Yogyakarta tetapi juga terjadi di daerah kabupaten-kabupaten di Yogyakarta seperti Bantul, Kulon Progo, Gunung Kidul, dan Sleman. Puncak dari keikutsertaan Ulama Muhammadiyah dalam Revolusi Fisik yaitu membantu TNI pada Serangan Umum 1 Maret dengan tugas menghambat pasukan Belanda memasuki kota.

Kata Kunci: Ulama Muhammadiyah, Revolusi Fisik, Yogyakarta.

A. PENDAHULUAN

Bangsa Indonesia memerlukan waktu lebih dari empat tahun untuk menyelesaikan pertikaian mengenai kedaulatan atas negaranya dengan Belanda. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi pertikaian itu, pemerintah Indonesia menempuh dua jalur perjuangan, yaitu : jalur diplomasi dan jalur militer.¹ Akan tetapi melalui jalur diplomasi, pihak Belanda selalu melakukan aksi sepihak ketika diadakan perundingan. Belanda dua kali mengadakan serbuan besar-besaran dan terang-terangan yang melanggar kesepakatan. Belanda menyebut tindakannya itu dengan *Aksi Polisionil*² yang pertama dan kedua, sedangkan Indonesia menyebutnya dengan Agresi Militer Belanda Pertama dan Kedua.

Berbagai kalangan lantas melakukan persiapan untuk mempertahankan

¹ Hisbaron Muryantoro, dkk., *Kilas Balik Sejarah Perjuangan Bangsa (1945-1950)*, (Yogyakarta: Proyek Pemanfaatan Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta, 2002), hlm. 52.

² *Aksi Polisionil* atau dikenal dengan sebutan Agresi Militer Belanda adalah agresi yang dilaksanakan dari tanggal 21 Juli 1947-5 Agustus 1947 (aksi pertama) dan dari tanggal 19 Desember 1948-14 Agustus 1949 (aksi kedua). Lihat: Yayasan 19 Desember 1948, *Dokumen Ripress dalam Perang Rakyat Semesta 1948-1949*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), hlm. 15.

kemerdekaan Indonesia, termasuk masyarakat Yogyakarta. Yogyakarta yang dikenal sebagai kota perjuangan mendapatkan predikat tersebut sehubungan dengan aktivitas juang dan peranan seluruh rakyat Yogyakarta dalam rangka turut serta merebut dan mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia, khususnya pada periode Perang Kemerdekaan.³ Rakyat di kota ini memiliki jiwa kemerdekaan yang sangat kuat untuk melawan penguasa kolonial dan memiliki peran yang penting dalam mempertahankan kemerdekaan.

Muhammadiyah sebagai salah satu organisasi keagamaan dan perjuangan juga dituntut untuk aktif mengambil bagian dalam membela dan mempertahankan negara yang baru didirikan itu. Bagi Muhammadiyah, upaya untuk membela dan mempertahankan negara Indonesia digerakkan oleh motivasi rasa kebangsaan dan keyakinan agama – perjuangan umat Islam dan perjuangan bangsa Indonesia adalah satu.⁴ Usaha yang dilakukan oleh

³ Dwi Ratna Nurhajarini, dkk., *Yogyakarta: Dari Hutan Beringin ke Ibukota Daerah Istimewa Yogyakarta*, (Yogyakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional Yogyakarta, 2012), hlm. 118-119.

⁴ Imron Nasri, *Muhammadiyah di Hadapan Saksi Sejarah*, (Yogyakarta: Majelis Pustaka dan Informasi Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 2012), hlm. 47-62.

Muhammadiyah tampak dari para ulamanya yang berjuang dari membentuk dasar negara Indonesia pada sidang yang dilakukan oleh BPUPKI dan PPKI.

Aksi Polisionil oleh Belanda memberikan kesadaran bagi para ulama Muhammadiyah untuk membentuk suatu badan yang bersifat militer. Mereka lantas memprakarsai berdirinya Markas Ulama Askar Perang Sabil (MUAPS) sebagai wadah bagi pemuda-pemuda Islam bekas laskar Hizbullah dan Sabilillah dan mengorganisasi mereka ke dalam Askar Perang Sabil (APS).⁵ Keterlibatan elit-elit agama Islam dalam perlawanan atau pemberontakan rakyat melawan kekuatan Barat nampak sejak gerakan-gerakan rakyat muncul secara sporadis hampir sepanjang abad ke-19 sampai dengan awal abad ke-20.⁶ Meskipun demikian, banyak kisah yang belum terungkap mengenai revolusi di tingkat lokal, khususnya tentang keterlibatan para tokoh-tokoh dan ulama

⁵ Suratmin, *Askar Perang Sabil Sebagai Kekuatan Sosio-Religius dalam Masa Revolusi Fisik di Daerah Istimewa Yogyakarta 1945-1949*, (Yogyakarta: Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Yogyakarta, 1996/1997), hlm. 20-21.

⁶ Mohammad Iskandar, *Peranan Elit Agama Pada Masa Revolusi Kemerdekaan Indonesia*, (Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, 2000), hlm. 36.

Muhammadiyah di Yogyakarta pada periode 1945-1949.

Berkat semangat yang ditanamkan serta dikobarkan ulama-ulama tersebut, maka pemuda-pemuda Islam di berbagai desa yang ada di Yogyakarta mencatatkan diri sebagai anggota Askar Perang Sabil. Penelitian ini menguraikan secara ringkas riwayat hidup, peranan, dan kontribusi dari beberapa ulama yang berasal dari Muhammadiyah dalam Revolusi Fisik 1945-1949.

B. SITUASI YOGYAKARTA PADA AWAL PROKLAMASI KEMERDEKAAN

Kekalahan Jepang pada Perang Pasifik tidak disia-siakan oleh bangsa Indonesia untuk mengumandangkan proklamasi. Pidato proklamasi kemerdekaan dikumandangkan oleh Ir. Soekarno dengan didampingi oleh Drs. Moh. Hatta atas nama bangsa Indonesia di Jalan Pegangsaan Timur 56, Jakarta Pusat (sekarang Jalan Proklamasi, Gedung Perintis Kemerdekaan) pada pukul 10.00 WIB.⁷ Berita mengenai proklamasi kemerdekaan ini sampai ke Yogyakarta melalui Berita Domei Cabang Yogyakarta pada pukul 12.00 WIB, meskipun berita

⁷ Marwati Djoened Poesponegoro dan Nugroho Notosusanto, *Sejarah Nasional Indonesia VI*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2010), hlm 149.

tersebut belum diketahui di semua daerah pada waktu yang bersamaan. Hal ini disebabkan oleh sulitnya komunikasi dan adanya penyegelan radio yang dilakukan oleh Jepang.⁸ Untuk daerah Jakarta dan sekitarnya, berita proklamasi cepat diketahui oleh umum karena para pemuda membuat pamflet dan menyebarkannya, sedangkan di Yogyakarta berita ini awalnya hanya mengejutkan dan membingungkan sebagian rakyat karena pemerintah Jepang melalui *Gunseikan Bu* berusaha merahasiakannya.⁹

Kabar tentang berita proklamasi yang telah tersebar dimasyarakat ternyata sampai kepada dua penguasa yang ada di Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono IX kemudian memanggil Sri Paduka Paku Alam VIII dan K.R.T. Honggowongso (staf senior di kepatihan). Pembicaraan itu menghasilkan kata “sepakat” untuk memberikan dukungan sepenuhnya terhadap proklamasi kemerdekaan. K.R.T. Honggowongso selanjutnya diperintahkan untuk membuat telegram¹⁰ kepada Ir. Soekarno dan Drs. Moh. Hatta serta kepada

⁸ *Ibid.*, hlm. 165.

⁹ Dwi Ratna Nurhajarini, dkk., *op.cit.*, hlm. 58.

¹⁰ Tashadi, dkk., *Keterlibatan Ulama di DIY Pada Masa Perang Kemerdekaan Periode 1945-1949*, (Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional Jakarta, 2000), hlm. 10.

dr. Radjiman Wedyodiningrat yang pokoknya berisi ucapan selamat atas diproklamasikannya kemerdekaan Indonesia dan terpilihnya kedua proklamator menjadi presiden dan wakil presiden.

Untuk lebih mengkonkritkan sikap kedua pimpinan daerah Yogyakarta tersebut dalam menyambut dan mengisi Proklamasi Kemerdekaan, maka pada tanggal 5 September 1945 Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paduka Pakualam VIII mengeluarkan amanat yang menyebutkan bahwa Kasultanan Yogyakarta dan Pakualaman adalah daerah istimewa dari negara Republik Indonesia (monarki Yogyakarta ke dalam Republik Indonesia). Pernyataan tersebut merupakan pernyataan politik yang mengandung nilai historis karena memperlihatkan sikap kedua penguasa itu dalam menerima pembaruan. Pada tanggal 6 September

1945, Mr. Sartono dan Mr. A.A. Maramis lantas datang ke Yogyakarta sebagai utusan dari pemerintah pusat untuk menyampaikan piagam penetapan mengenai kedudukan Yogyakarta dalam lingkungan Republik Indonesia yang ditandatangani oleh Presiden Soekarno.¹¹

¹¹ Suratmin dan Daliso Rudianto, *Sri Sultan Hamengku Buwono IX: Pejuang dan Pelestari Budaya*, (Yogyakarta:

Pustaka Kaiswaran, 2012), hlm. 75-76.

Pada tanggal 13 Oktober 1945 pemerintah Republik Indonesia yang diwakili oleh R.P. Suroso menyatakan bahwa Yogyakarta sangat menentukan untuk masalah-masalah yang berkaitan dengan perebutan kekuasaan.¹² Hal inilah yang menyebabkan dibentuknya Komite Nasional Indonesia Daerah (KNID) Yogyakarta. KNID Yogyakarta pada mulanya berkantor di *Hooko Kai* (Badan Kebaktian Rakyat), yaitu di Jalan K.H. Ahmad Dahlan (sekarang digunakan oleh Kanwil Departemen Penerangan Yogyakarta). Sesuai dengan usaha yang telah digariskan oleh KNI Pusat, maka badan ini bertugas untuk menyalurkan dan memperjuangkan segala kehendak rakyat. Badan inilah yang kemudian menjadi kemudi segala gerakan untuk melancarkan jalannya revolusi dan menjadi badan setaraf dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).¹³

Sebagai reaksi terhadap proklamasi kemerdekaan, maka rakyat Yogyakarta

¹² Dinas Sosial Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, *Replika Sejarah Perjuangan Rakyat Yogyakarta Jilid I*, (Yogyakarta: Dinas Sosial Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, 1983), hlm. 22.

¹³ Tashadi, dkk., *Sejarah Revolusi*

Kemerdekaan (1945-1949) di Daerah Istimewa Yogyakarta, (Jakarta: Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional, 1991), hlm. 71.

mulai melaksanakan perebutan kekuasaan dengan melakukan penurunan bendera Hinomaru di *Cokan Kantai* (sekarang Gedung Agung) pada tanggal 21 September 1945.¹⁴ Sebelum peristiwa itu terjadi, sebenarnya sudah ada delegasi Indonesia yang diwakili oleh Jalaludin Nasution (Sekretaris Promotor Pemuda Nasional) yang menghadap *Kooti Zimu Kyuku Cokan* (Gubernur Jepang) untuk meminta agar bendera Hinomaru diturunkan dan digantikan dengan Merah Putih. Permintaan tersebut sebenarnya dikabulkan, namun hanya sesaat karena diturunkan lagi oleh tentara Jepang. Hal inilah yang menyulut amarah masyarakat dan Polisi Istimewa. Ribuan massa yang membawa berbagai jenis senjata dengan didukung oleh Polisi Istimewa kemudian bergerak ke *Cokan Kantai*.

Puncak dari pengambilalihan kekuasaan tersebut adalah terjadinya Pertempuran Kotabaru. Usaha pelucutan senjata ini sebenarnya sudah dilakukan secara damai melalui perundingan yang dilaksanakan pada tanggal 6 Oktober 1945 di rumah *Butaico* Kotabaru (Gedung Dana Pensiun yang sekarang berada di sebelah barat SMA N 3 Yogyakarta).¹⁵ Pihak Indonesia sendiri diwakili oleh R.

¹⁴ Dinas Sosial Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, *op.cit.*, hlm. 11.

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 24.

Mohammad Saleh (Ketua KNID), R.P. Sudarsono, Sunyoto, dan Bardosono, sedangkan pihak Jepang diwakili oleh Mayor Oztuka, Kempetai Cho Sasaki, Kapten Ito, dan Kiabuco. Setelah berlangsung selama \pm 8 jam, perundingan yang dimulai pada pukul 19.00 WIB tersebut akhirnya mengalami jalan buntu. Gagalnya perundingan inilah yang menyebabkan pertempuran tak dapat dihindarkan lagi. Rakyat dan pemuda yang telah berkumpul di depan gedung dan digerakkan oleh Komite Nasional Indonesia Daerah (KNID), Barisan Penjagaan Umum (BPU), Badan Keamanan Rakyat (BKR), dan Polisi Istimewa (PI) akhirnya memulai penyerangan pada tanggal 7 Oktober 1945 pukul 04.00 WIB.¹⁶

C. ULAMA MUHAMMADIYAH DALAM PEMBENTUKAN ASKAR PERANG SABIL

Sebagai pemuka agama Islam yang memiliki otoritas kharismatik, para ulama biasanya dijadikan sebagai contoh panutan yang baik dalam lingkungan masyarakatnya. Hal inilah yang menyebabkan masyarakat menempatkan ulama sebagai penasehat ataupun pemimpin pergerakan karena dekat dan

¹⁶ Hisbaron Muryantoro, dkk., *op.cit.*, hlm. 11-12.

merakyat.¹⁷ Ulama sendiri diartikan sebagai orang yang ahli dalam hal atau dalam pengetahuan agama Islam. Secara harfiah ulama juga disebut sebagai orang Muslim yang menguasai ilmu agama Islam, Muslim yang memahami syariat Islam secara menyeluruh (kaaffah) sebagaimana terangkum dalam Al-Quran dan As-Sunnah, serta menjadi teladan umat Islam dalam memahami serta mengamalkannya.

Muhammadiyah merupakan gerakan organisasi Islam dan dakwah *amar ma'ruf nahi munkar* yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Sebagai sebuah organisasi, Muhammadiyah merupakan gerakan yang terstruktur, selalu mengembangkan aktivitas organisasinya, memberikan ajaran yang menuntut kemajuan, kecerdasan, kehidupan sosial, dan pendidikan modern yang sangat diperlukan bagi pembangunan dan kemajuan bangsa Indonesia sejalan dengan ajaran Islam.

Kondisi ulama Muhammadiyah dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia nampak melalui tempat ibadah yang digunakan untuk memberikan ajaran-ajaran

¹⁷ Ahmad Adaby Darban, "Ulama Jawa Bagian dari Warisan Budaya Islam di Indonesia: Dinamika Perkembangan dan Perjuangannya", *Makalah Seminar Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Yogyakarta*, 9 Nopember 1995, hlm. 1.

Islam dan pegangan hidup yang berkaitan dengan perjuangan mempertahankan kemerdekaan, serta membentuk kader pejuang untuk melakukan perlawanan terhadap penjajahan. Selain itu, ulama mempunyai andil dalam perjuangan kemerdekaan baik dengan memimpin langsung dalam pertempuran maupun dengan doa dan nasehatnya. Banyak tokoh dan ulama Muhammadiyah yang ikut ambil dalam menyumbang tenaga dan pikirannya untuk menentukan masa depan Negara Indonesia, salah satunya melalui gagasan dan perilaku politik tentang Negara Islam. Peran ulama Muhammadiyah diawali dengan keikutsertaannya dalam BPUPKI dan PPKI yang bertugas untuk menyusun Undang-Undang Dasar. Hasilnya dapat dilihat dari Sila Pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa yang merupakan buah pemikiran dari salah satu ulama Muhammadiyah yaitu Ki Bagus Hadikusumo.

Pada tanggal 20 Juli - 4 Agustus 1947 Belanda kembali berusaha untuk menguasai Indonesia dengan melancarkan serangannya kebeberapa wilayah di Indonesia yang dikenal dengan Agresi Militer I. Hal ini membuat keprihatinan dikalangan ulama di Daerah Istimewa Yogyakarta. Pada bulan Ramadhan tahun 1947 para ulama Muhammadiyah melakukan *iktikaf* di Masjid Taqwa Suronatan. Hasilnya ditetapkan pembentukan organisasi Askar perang

Sabil (APS) dan Markas Ulama Askar Perang Sabil (MUAPS) yang merupakan organisasi gabungan dari bekas laskar Hizbullah dan Sabilillah. Laskar ini diharapkan mampu menjawab segala tindakan Belanda kepada Indonesia dan diharapkan APS mampu membantu TNI dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia.¹⁸

Gagasan dibentuk APS dan MUAPS itu disampaikan dalam musyawarah para ulama Muhammadiyah di Yogyakarta yang dihadiri oleh K.H.R. Hadjid, K.H. Juraimi, K.H. Mahfudz Siradj, K.H. Bagus Hadikusumo, K.H. Abdul Aziz, K.H. Djohar, K.H. Amin, K.H. Daim, K.H. Ahmad Badawi, Bakri Syahid, M. Sarbini, Abdullah Mabur, dan lain-lainnya.¹⁹ Adapun susunan pengurus pusat APS sebagai berikut :

Penasehat	: Ki Bagus Hadikusumo
Imam	: K.H. Mahfudz Siradj
Ketua	: K.H.R. Hadjid
Wakil Ketua	: K.H. Ahmad Badawi

¹⁸ Abdur Rahman, "Laskar Angkatan Perang Sabil 1948-1949" dalam *Agama dan Kemasyarakatan*, (Yogyakarta: Lembaga Research dan Penelitian IAIN Sunan Kalijaga, 1983), hlm. 10.

¹⁹ Suhatno, *Ki Bagus Hadikusuma, Hasil Karya dan Pengabdiannya*, (Jakarta: Proyek IDSN Ditjarahnitra-Depdikbud, 1982), hlm. 121.

Bendahara : K.H. Abdul Aziz dan
H. Hasyim
Komandan : M. Sarbini
Wakil Komandan : K.H. Juraimi
Penerangan : Siradj Dahlan
Perlengkapan : Abdul Djawad
Persenjataan : M. Bakri Sudja'
Logistik : Bakri Syahid
Administrasi : Daim.²⁰

Susunan Organisasi ini kemudian dilaporkan kepada menteri pertahanan yang waktu itu dijabat oleh Sri Sultan Hamengku Buwono IX guna untuk memperoleh persetujuan. Ditetapkan pula tiga orang utusan yakni K.H. Mahfudz Siradj, K.H. Ahmad Badawi, dan Ki Bagus Hadikusumo untuk menghadap Sri Sultan Hamengku Buwono IX di Kraton Yogyakarta.²¹ Sri Sultan Hamengku Buwono IX berkenan dan merestui dibentuknya Askar perang Sabil yang

tertuang dalam serat kekancingan menggunakan Bahasa Jawa.²²

Sri Sultan Hamengku Buwono IX memerintahkan kepada para utusan ulama tersebut untuk menghadap kepada Panglima Besar Jenderal Soedirman agar memperoleh izin. Oleh karena itu, ketiga utusan yang didampingi Muhammad Sarbini menghadap Panglima Besar Jenderal Sudirman di Bintaran. Panglima Besar Jenderal Sudirman menyetujui gagasan para ulama dalam pembentukan MUAPS dan APS, bahkan beliau bersedia memberi bantuan perlengkapan untuk latihan dan tenaga pelatih yang dipimpin oleh Mayor Fakhruddin.²³

Disamping menghadap Sri Sultan HB IX dan Panglima Jenderal Sudirman, para ulama lainnya yang didampingi K.H. Hadjid menghadap para tokoh masyarakat untuk mengadakan hubungan dengan pemerintah sipil dan militer di Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu menghubungi Bupati dan komandan militer setempat.²⁴

²⁰ Lembaga Penelitian Pengembangan dan Pengabdian Masyarakat (LP3M) Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, *Selintas Perjalanan Askar Perang Sabil (APS) dan Markas Ulama Askar Perang Sabil (MUAPS)*, tanggal 1 juli 1993, hlm.1.

²¹ PP Muhammadiyah Majelis Pustaka, "Perkembangan Muhammadiyah", Naskah Sejarah Muhammadiyah, (Yogyakarta: PP Muhammadiyah Majelis Pustaka, 1989), hlm. 5.

²² *Serat kekancingan* merupakan jawaban dari Sri Sultan Hamengku Buwono IX tentang pendirian Askar Perang Sabil. Surat ini merupakan restu dari Sri Sultan untuk para Ulama dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia.

²³ Syaifullah, *Gerak Politik Muhammadiyah dalam Masyumi*, (Jakarta: Grafiti, 1997), hlm. 131.

²⁴ Suratmin., *op.cit*, hlm. 25.

Adanya persetujuan dari menteri pertahanan, panglima besar dan gubernur Militer RI tentang pembentukan APS dan MUAPS, maka secara resmi berdirilah pasukan bersenjata APS pada tanggal 23 Juli 1947 bertepatan dengan tanggal 17 ramadhan 1367 H di Yogyakarta.²⁵ APS merupakan sebuah organisasi kelaskaran yang terbentuk atas prakarsa para ulama Yogyakarta yang sebagian besar berasal dari kalangan Muhammadiyah, sehingga APS bisa dikatakan sebagai organisasi kelaskaran bentukan Muhammadiyah.²⁶

D. KETERLIBATAN ULAMA MUHAMMADIYAH DALAM PERANG KEMERDEKAAN DI YOGYAKARTA

Tanggal 15 Maret 1947, pemerintah Indonesia dan pemerintah Belanda menandatangani perjanjian Linggarjati di Istana Gambir Jakarta.²⁷ Pihak Belanda secara sengaja melanggar perjanjian

Linggarjati dengan mengadakan serangan di Bogor, Mojokerto dan tempat lainnya yang membuat suasana semakin memanas.²⁸ Pada tanggal 27 Mei 1947 sebelum berdirinya TNI, Belanda yang diwakilki oleh Van Mook melakukan ultimatum kepada Indonesia. Ultimatum tersebut berisi tentang pemerintahan bersama, uang bersama, impor ekspor bersama, dan devisa bersama.²⁹

Merasa kurang mendapat tanggapan yang positif dari Indonesia, maka pada tanggal 21 Juli 1947 Belanda melancarkan agresi militer di Indonesia pada malam hari. Serangan tentara Belanda terfokus pada tiga tempat yaitu Sumatera Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Di Sumatera Timur sasarannya adalah daerah perkebunan tembakau, di Jawa Tengah untuk menguasai pantai utara, dan di Jawa Timur sasaran utamanya adalah perkebunan tebu dan pabrik gula.³⁰

²⁵ Wawancara dengan Suratmin. Selasa, 3 Mei 2016 di Sanggrahan, Umbulharjo/No.576, RT 05 RW 02, Semaki, Yogyakarta.

²⁶ MT. Arifin, *Muhammadiyah Potret yang Berubah*. (Surakarta: Institut Gelanggang Pemikiran Filsafat Sosial Budaya dan Kependidikan, 1990), hlm. 211.

²⁷ A.B.Lapian & P.J.Drouglover. *Menelusuri Jalur Linggarjati Diplomasi dalam Perspektif Sejarah*. (Jakarta : Grafiti, 1992), hlm. 4.

²⁸ C.S.T. Kansil dan Julianto, *Sedjarah Perjuangan Pergerakan Kebangsaan Indonesia*, (Jakarta: Erlangga, 1972), hlm. 54.

²⁹ Dinas TNI AD, *Cuplikan Sejarah Perjuangan TNI AD*, (Bandung: Fa. Mahyuma, 1972), hlm. 134.

³⁰ Batara R.Hutagalung, *Serangan Umum 1 Maret 1949 Dalam Kaleidoskop Sejarah Perjuangan Mempertahankan Kemerdekaan Indonesia*, (Yogyakarta : LkiS, 2010), hlm. 280.

Yogyakarta sebagai pusat pemerintahan saat itu juga tak luput dari sasaran agresi militer Belanda. Serangan di Yogyakarta dimulai pada tanggal 21 Juli 1947 sekitar pukul 07.00 dimana lapangan terbang Maguwo diserang lewat udara oleh Belanda. Sekitar empat buah pesawat bom terbang mengitari ibu kota Yogyakarta yang kemudian selang beberapa menit Belanda mulai melakukan aksinya dengan menjatuhkan bom dan menembaki TNI yang berada di lapangan Maguwo. Pukul 15.00 Belanda menambah jumlah pesawat mereka dan kembali melakukan serangan ke daerah lapangan Maguwo. Belanda berdalih serangan itu hanya sekedar tindakan keamanan dan ketertiban saja.³¹

Melihat situasi tersebut MUAPS kemudian mengirimkan pasukan bersenjata Askar Perang Sabil ke front pertempuran. Pengiriman pertama dilakukan ke daerah Semarang yaitu Mranggen dan Srandol. Markas APS yang pada waktu itu berada di Tegallayang Pandak juga mengirimkan satu pasukan yang dipimpin oleh K.H. Juraimi dengan didampingi K.H. Hadjid sebagai imam. Sementara itu APS cabang Sleman juga mengirimkan bantuan satu kompi dengan dipimpin oleh Badri didampingi K. Abdurrahman sebagai imam keduanya berhasil bergabung untuk

³¹ C.S.T. Kansil dan Julianto., *loc.cit.*

melawan Belanda di daerah Mranggen Utara dan Selatan.³²

Pada tanggal 31 Juli 1947 diputuskan bahwa anggota APS bersenjata ditempatkan di perbatasan Kebumen yaitu di daerah Grabag sebelah timur Kecamatan Pingit.³³ Penempatan ini berdasarkan atas perintah Panglima Besar Sudirman melalui surat perintah dari Jendral Urip Sumoharjo yang menjabat sebagai Kepala staff TNI. Perintah ini kemudian ditindak lanjuti MUAPS dengan mengirimkan satu Bataliyon yang dilengkapi 120 pucuk senjata yang dipimpin oleh Sarbini dan K.H. Juraimi sebagai wakil komandan diikuti pula oleh K.H Mahfudz Siraidj dan K.R.H Hadjid sebagai imam.³⁴ Pasukan ini bertemu dengan Komandan TNI Mayor

³² Wawancara dengan Darmaji Basuki Rahmat, tanggal 8 Januari 2017 di Kampung Kauman RT.06/RW.10, Ngupasan, Gondomanan Yogyakarta.

³³ Nur Aini Setyawati, "Askar Perang Sabil : Studi Sosio-Religius Dalam Perjuangan Kemerdekaan Republik Indonesia Di Daerah Istimewa Yogyakarta", (Skripsi Jur.Sejarah FS-UGM, 1988), hlm.11.

³⁴ Kehadiran para imam dan ulama didalam pertempuran tidak hanya untuk memimpin upacara ibadah dan merawat orang, tetapi juga untuk memelihara ketabahan mental dan mengobarkan semangat *jihad fisabilillah* dalam mempertahankan kemerdekaan. Lihat Yunus Anis dkk, *Kenalilah Pemimpin Anda*, (Yogyakarta: PP Muhammadiyah Majelis Pustaka), hlm. 25.

Yani di daerah Pingit. Kemudian keduanya bekerjasama mengadakan pertahanan di Pegunungan Ngrancak Ambarawa ke timur sampai Desa Tirto. Mereka melakukan pencegahan dan penjagaan di jalan antara Salatiga, Magelang dan Kebumen.³⁵ Pasca diterimanya resolusi PBB resolusi No. 27 tanggal 1 Agustus 1947 tentang genjatan senjata antara Belanda dan Indonesia membuat MUAPS pusat mengambil tindakan dengan mengakhiri tugas pasukan APS di Kebumen. Namun, pasukan APS bertahan di daerah ini hingga awal tahun 1948.

Pada 6 Agustus 1948, Dr. Willem Drees menjadi Perdana Menteri kabinet koalisi bersama Partai Katolik. Dia menggantikan Dr. L.J.M. Beel yang kemudian diangkat menjadi Hooge Vertegenwoordiger van de Kroon (Wakil Tinggi Mahkota) Belanda di Indonesia. Beel menggantikan posisi van Mook sebagai Wakil Gubernur Jenderal. Pada tanggal 18 Desember 1948 pukul 23.30 dengan perantara sepucuk surat, pemerintah Belanda memberitahu Komisi Tiga Negara tentang dibatalkannya genjatan senjata dan perjanjian Renville dengan pihak Indonesia, kabar tersebut juga disampaikan kepada bangsa

Indonesia.³⁶ Kemudian pada tanggal 19 Desember 1948 pagi hari, pasukan Belanda secara mendadak menyerang lapangan udara Maguwo melalui pasukan udaranya.

Dipihak lain para ulama melakukan perintah dari panglima Sudirman untuk ke luar kota dan bergabung dengan TNI. Namun, sebelum itu mereka mengadakan pembagian tugas di antara para anggotanya yaitu mereka yang harus tetap tinggal di kota dan yang diperbolehkan meninggalkan kota. Anggota badan perjuangan MUAPS yang mendapatkan tugas untuk tetap tinggal di kota antara lain : Mato Jumeni, K. Mahfudz Siradj, KH. Badawi, K. Juroini, dan lain-lain. Adapun pasukan bersenjata APS yang diperbolehkan meninggalkan kota keluar melalui markasnya yang telah dipindahkan dari Kauman ke Notoprajan.³⁷

Pasukan TNI bersama dengan APS bekerjasama dalam menghadang masuknya tentara Belanda ke Ibu kota Yogyakarta hingga batas daerah Kabupaten Bantul. Kontak fisik antara pasukan APS dengan tentara Belanda tidak dapat dihindarkan,

³⁶ Slamet Muljana, *Kesadaran Nasional dari Kolonialisme sampai Kemerdekaan jilid II*, (Yogyakarta : LKIS, 2008), hlm. 201.

³⁷ Wawancara dengan Darmaji Basuki Rahmat, tanggal 8 Januari 2017 di Kampung Kauman RT.06/RW.10, Ngupasan, Gondomanan Yogyakarta.

³⁵ *Ibid.*, hlm.69

akibatnya lima orang pasukan APS gugur dalam pertempuran itu. Pasukan APS selanjutnya bertahan di Karangajen, dari sana pasukan APS terus melakukan gerilya selama seminggu untuk menyerang pasukan Belanda di dalam kota. Belanda ternyata mengetahui keberadaan markas pasukan APS di Karangajen, sehingga dilakukan penyerangan dan akibat dari penyerangan tersebut empat orang pasukan APS gugur di medan pertempuran.³⁸

Di Bantul Belanda melancarkan aksinya kembali menyerang dan mengepung Pabrik Padokan. Serangan itu menyebabkan lima anggota APS gugur. Di Sleman Pasukan bersenjata APS menyerang pos Belanda di Jembatan Bantar dari tiga arah yaitu dari barat, timur, dan selatan. Pertempuran di jembatan Bantar mengakibatkan 11 anggota APS gugur.³⁹ Di daerah Kulonprogo banyak gangguan dari garong dan perampok yang merajalela, sehingga atas permintaan MUAPS cabang Kulonprogo pasukan bersenjata APS dari Yogyakarta di bawah pimpinan Harun Al Rosyid dikirim untuk mengamankan wilayah tersebut.⁴⁰ Kekuatan ulama yang tergabung dalam

³⁸ Nur Aini S., *op.cit.*, hlm. 79-81.

³⁹ *Ibid.*, hlm. 97.

⁴⁰ Gerilya Wehrkreise III, (Yogyakarta : Percetakan Keluarga, tt), hlm. 47.

badan perjuangan MUAPS di Gunungkidul yang dipusatkan di Kecamatan Panggang dengan M. Hani bertindak sebagai imam, dibantu oleh Harun Al-Rosyid sebagai Komandan dan Mawardi sebagai wakil komandan pertempuran.⁴¹ Mereka selanjutnya membagi kekuatan kesetiap kecamatan kecuali Tepus dan Rongkop untuk dilatih bergerilya dalam menghadapi tentara Belanda.

Dalam rangka menyerang Kota Yogyakarta pada tanggal 1 Maret 1949 pasukan APS diatur sedemikian rupa untuk mengadakan persiapan dari arah selatan beteng dan tersebar didalam kota di bawah pimpinan Komandan TNI Kompi Komarudin. Di daerah Bantul pasukan bersenjata APS di bawah pimpinan Sunarjo mengadakan konsolidasi di sekitar Sewon untuk menghambat masuknya pasukan Belanda yang datang dari Barongan. Sedangkan di Sleman barat pasukan bersenjata APS di bawah pimpinan Arnis yang ada di bawah koordinasi SWK 103 mengadakan rintangan di sepanjang Jalan Sudagaran dengan sasaran Stasiun Tugu dan hotel Tugu. Pasukan bersenjata APS di bawah pimpinan Masyudi dan Badri juga mengadakan pertahanan disekitar jembatan Krasak untuk menghadang pasukan Belanda dari Utara.⁴² Selain itu, pasukan

⁴¹ Nur Aini S., *op.cit.*, hlm. 125.

⁴² *Ibid.*,

bersenjata APS juga dipersiapkan untuk mengadakan rintangan di sepanjang Jalan Yogyakarta - Magelang dan pasukan bersenjata APS yang berada disetiap sudut Kota baik di Kauman, Notoprajan, Suronatan, Lempuyangan, Pakualaman, Mergangen, Karangajen, dan tempat lainnya siap untuk menerima perintah dari TNI untuk mengadakan serangan terhadap Belanda.⁴³ TNI bersama ulama dan pasukan APS berhasil menguasai kota Yogyakarta selama kurang lebih 6 jam. Setelah Belanda meninggalkan Yogyakarta, peranan MUAPS di bidang sosial keagamaan tetap berlangsung seperti semula. Namun, tak sedikit pula para anggota MUAPS yang melanjutkan karirnya dengan masuk kedalam anggota TNI.

E. KESIMPULAN

Berita tersiarnya proklamasi masuk pertama kali ke Yogyakarta melalui Kantor Berita Domei Cabang Yogyakarta. Tanggapan dari Sri sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paduka Paku Alam VIII menyatakan bahwa kedua wilayah tersebut bergabung ke NKRI. Untuk memperlancar jalannya pemerintahan maka pada tanggal 13 Oktober dibentuklah KNID Yogyakarta. Pembentukan KNID di Yogyakarta diprakarsai oleh para kaum

nasionalis tua. Tugas tentang pemerintahan di Yogyakarta pada tanggal 30 Oktober 1945 secara resmi diberikan kepada KNID Yogyakarta. Beberapa waktu kemudian KNID dihapus dan diganti dengan DPRD sesuai maklumat No.18 tahun 1946. Buntut dari diproklamirkannya kemerdekaan Indonesia membuat rakyat Yogyakarta tergerak untuk merebut kekuasaan dari Jepang. Perebutan kekuasaan diawali dengan diturunkannya bendera Hinomaru di Gedung Agung yang digantikan dengan bendera merah putih. Peristiwa lainnya pada pertempuran di Kota Baru, tentara dan para laskar berhasil merebut dan melucuti senjata dari Jepang.

Para ulama Muhammadiyah juga membentuk pasukan bersenjata Askar perang sabil (APS) dan badan perjuangan Markas Ulama Askar Perang Sabil (MUAPS) secara resmi dibentuk tanggal 23 Juli 1947 yang pada saat itu bertepatan dengan tanggal 17 Ramadhan 1367 H. Pembentukan badan ini didahului oleh beberapa rangkaian kejadian yang mematangkan situasi untuk melahirkan pasukan bersenjata dan badan perjuangan sebagai wadahnya. Salah satu rangkaian kejadian itu adalah adanya Agresi Militer Belanda yang pertama pada tanggal 21 Juli 1947. Peristiwa ini menyebabkan beberapa daerah di Jawa Tengah diduduki Belanda. Keadaan ini mengakibatkan munculnya keprihatinan para ulama di daerah istimewa

⁴³ *Ibid.*, hlm 101.

Yogyakarta yang kemudian memprakarsai terbentuknya Askar Perang Sabil (APS) dan Markas Ulama Askar Perang Sabil (MUAPS). Askar Perang Sabil merupakan badan perjuangan Muhammadiyah yang terdiri dari anggota bekas laskar Hizbullah dan Sabillilah.

Peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam kurun waktu 1947-1949 mendorong para Ulama Muhammadiyah untuk ikut serta dalam melawan Belanda. Wujud keikutsertaan Ulama Muhammadiyah tergambar dari beberapa peristiwa pada masa Agresi Belanda I untuk pertama kalinya pasukan APS diterjunkan kedalam peperangan. Daerah Mranggen dan Sronol adalah daerah pertama pasukan APS berhadapan dengan Belanda. Pada masa ini juga untuk pertama kalinya APS bekerjasama dengan TNI dalam memepertahankan kemerdekaan Indonesia. Agresi Belanda II yang terjadi di Yogyakarta mendorong para anggota APS yang tersebar di berbagai kabupaten untuk mempersiapkan diri untuk menghadapi serangan yang dilancarkan oleh pihak Belanda. Pada saat serangan Agresi Belanda II mengakibatkan banyaknya anggota APS yang gugur baik golongan sipil maupun dari anggota keluarga para ulama. Pada Serangan Umum 1 Maret MUAPS dan APS mendapat tugas untuk menghambat pasukan Belanda dari berbagai sektor seperti di Sewon, di

sepanjang Jalan Sudagaran, Stasiun Tugu Hotel Tugu, dan Jalan Yogyakarta-Magelang. Selain itu pasukan APS dan TNI juga mengadakan pertahanan di Jembatan Krasak. Pasca Belanda ditarik mundur dari Yogyakarta, MUAPS kembali ke fungsinya sebagai pendakwah dan pasukan APS kembali kemasyarakat dengan pekerjaannya masing-masing.

DAFTAR PUSTAKA

Arsip

*Serat Kekantjingan Dalem Ngarsa
Sampejan Dalem Inggang
Sinuwun Kanjeng Sultan
Ngajogjakarta Dumateng Asjkar
Perang Sabilillah.*

Buku, Artikel, Majalah

Abdur Rahman, “*Laskar Angkatan Perang Sabil 1948-1949*” dalam *Agama dan Kemasyarakatan*, (Yogyakarta: Lembaga Research dan Penelitian IAIN Sunan Kalijaga, 1983).

Ahmad Adaby Darban, “*Ulama Jawa Bagian dari Warisan Budaya Islam di Indonesia: Dinamika Perkembangan dan Perjuangannya*”, Makalah Seminar Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Yogyakarta, 9 Nopember 1995.

Arifin, MT, *Muhammadiyah Potret yang Berubah*, (Surakarta: Institut Gelanggang Pemikiran Filsafat Sosial Budaya dan Kependidikan, 1990)Hisbaron Muryantoro, dkk., *Kilas Balik Sejarah Perjuangan Bangsa (1945-1950)*, (Yogyakarta: Proyek Pemanfaatan Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta, 2002).

Batara R. Hutagalung, *Serangan Umum 1 Maret 1949 Dalam Kaleidoskop Sejarah Perjuangan Mempertahankan Kemerdekaan Indonesia*, (Yogyakarta : LkiS, 2010).

Dinas TNI AD, *Cuplikan Sejarah Perjuangan TNI AD*, (Bandung: Fa. Mahyuma, 1972).

Djanarwi Hadikusumo, *Derita Seorang Pemimpin: Riwayat Hidup, Perjoengan dan Buah Pikiran Ki Bagus Hadikusumo*. (Yogyakarta: Persatuan, 1979).

Dwi Ratna Nurhajarini, dkk., *Yogyakarta: Dari Hutan Beringin ke Ibukota Daerah Istimewa Yogyakarta*, (Yogyakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional Yogyakarta, 2012).

Gerilya Wehrkreise III, (Yogyakarta : Percetakan Keluarga, tt).

Hisbaron Muryantoro, dkk., *Kilas Balik Sejarah Perjuangan Bangsa (1945-1950)*, (Yogyakarta: Proyek Pemanfaatan Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta, 2002).

Imron Nasri, *Muhammadiyah di Hadapan Saksi Sejarah*, (Yogyakarta: Majelis Pustaka dan Informasi Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 2012).

Kansil, C.S.T. dan Julianto, *Sedjarah Perdjuangan Pergerakan Kebangsaan Indonesia*, (Jakarta: Erlangga, 1972).

Lapian, A.B & P.J.Drouglever. *Menelusuri Jalur Linggarjati Diplomasi dalam Perspektif Sejarah*. (Jakarta : Grafiti, 1992).

Lembaga Penelitian Pengembangan dan Pengabdian Masyarakat (LP3M) Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, *Selintas Perjalanan*

- Askar Perang Sabil (APS) dan Markas Ulama Askar Perang Sabil (MUAPS)*, tanggal 1 juli 1993.
- Marwati Djoened Poesponegoro dan Nugroho Notosusanto, *Sejarah Nasional Indonesia VI*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2010)
- Mohammad Iskandar, *Peranan Elit Agama Pada Masa Revolusi Kemerdekaan Indonesia*, (Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, 2000).
- PP Muhammadiyah Majelis Pustaka, *“Perkembangan Muhammadiyah”*, *Naskah Sejarah Muhammadiyah*, (Yogyakarta: PP Muhammadiyah Majelis Pustaka, 1989).
- Slamet Muljana, *Kesadaran Nasional dari Kolonialisme sampai Kemerdekaan jilid II*, (Yogyakarta : LKIS, 2008).
- Suhatno, *Ki Bagus Hadikusuma, Hasil Karya dan Pengabdianya*, (Jakarta: Proyek IDSN Ditjarahnitra-Depdikbud, 1982).
- Suratmin, *Askar Perang Sabil Sebagai Kekuatan Sosio-Religius dalam Masa Revolusi Fisik di Daerah Istimewa Yogyakarta 1945-1949*, (Yogyakarta: Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Yogyakarta, 1996/1997).
- Suratmin dan Daliso Rudianto, *Sri Sultan Hamengku Buwono IX: Pejuang dan Pelestari Budaya*, (Yogyakarta: Pustaka Kaiswaran, 2012).
- Syaifullah, *Gerak Politik Muhammadiyah dalam Masyumi*, (Jakarta: Grafiti, 1997).
- Tashadi, dkk., *Sejarah Revolusi Kemerdekaan (1945-1949) di Daerah Istimewa Yogyakarta*, (Jakarta: Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional, 1991)
- _____, *Keterlibatan Ulama di DIY Pada Masa Perang Kemerdekaan Periode 1945-1949*, (Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional Jakarta, 2000).
- Yayasan 19 Desember 1948, *Dokumen Ripress dalam Perang Rakyat Semesta 1948-1949*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1994)

Skripsi

- Nur Aini Setyawati, *”Askar Perang Sabil : Studi Sosio-Religius Dalam Perjuangan Kemerdekaan Republik Indonesia Di Daerah Istimewa Yogyakarta”*, (Skripsi Jur.Sejarah FS-UGM, 1988).

Tashadi, dkk., *Sejarah Revolusi Kemerdekaan (1945-1949) di Daerah Istimewa Yogyakarta*, (Jakarta: Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional, 1991)

_____, *Keterlibatan Ulama di DIY Pada Masa Perang Kemerdekaan Periode 1945-1949*, (Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional Jakarta, 2000).

Yayasan 19 Desember 1948, *Dokumen Ripress dalam Perang Rakyat Semesta 1948-1949*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1994)

Skripsi

Nur Aini Setyawati, "*Askar Perang Sabil : Studi Sosio-Religius Dalam Perjuangan Kemerdekaan Republik Indonesia Di Daerah Istimewa Yogyakarta*", (Skripsi Jur.Sejarah FS-UGM, 1988).